

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN  
DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM  
DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**DAHLIA**

**NPM. 1621020461**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

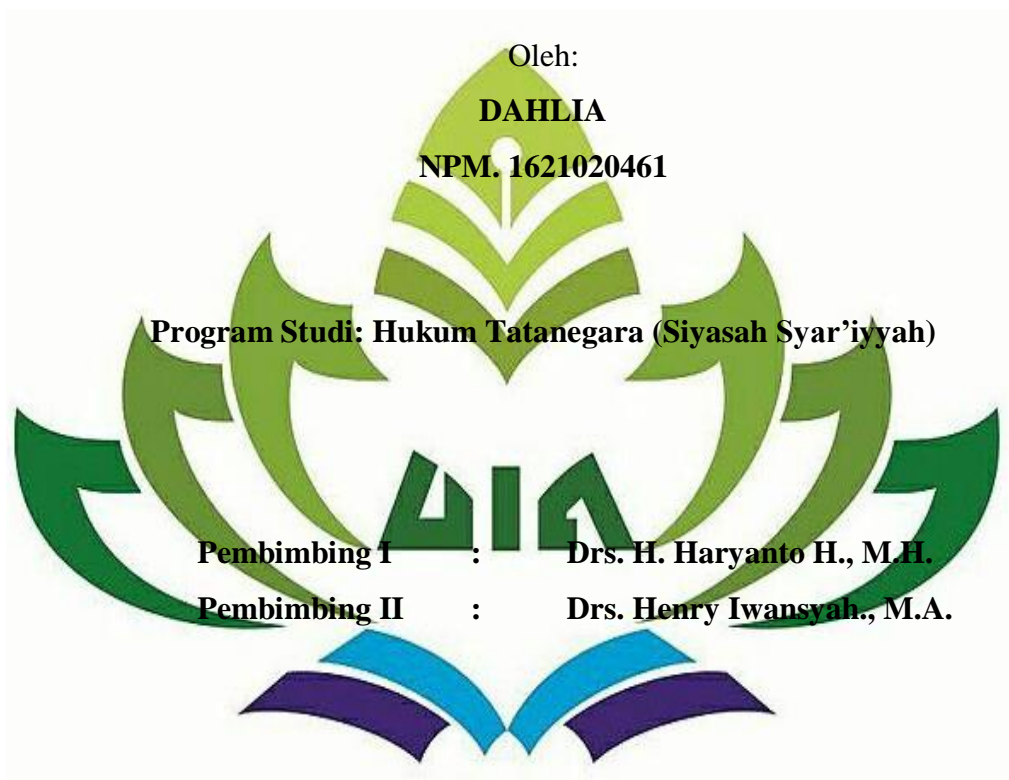


**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN  
DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM  
DI INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

**DAHLIA**

**NPM. 1621020461**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.**

**Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum yang bersifat plural. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat serta hukum barat. Lahirnya berbagai peraturan daerah bernuansa syariah secara filosofis-yuridis karena adanya pergantian paradigma yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah bernuansa Syariah itu sendiri merupakan sebuah peraturan daerah biasa yang berlandaskan Syariat Islam atau memuat nilai-nilai keislaman yang diberlakukan di suatu daerah. Materi muatan Perda bernuansa syariah yang berisikan nilai-nilai keislaman menarik untuk dikaji apakah Perda yang memuat nilai-nilai keislaman ini masuk dalam sistem hukum di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, yaitu Apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia dan Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah bernuansa syariah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah. penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah, berita atau artikel. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara penentuan bahan hukum, dokumen bahan hukum yang relevan. Pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara pemeriksaan bahan hukum, rekonstruksi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengolahannya, yaitu *editing, coding, reconstructing*, dan *systematizing*.

Hasil Penelitian ini, yaitu : *pertama*, Peraturan daerah bernuansa syariah masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, dari sudut pandang historis, Perda bernuansa syariah telah ada semenjak Indonesia Merdeka yang berdasarkan pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa bahwa semua aturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dilihat dari sumber hukum dan materi muatan, Perda bernuansa syariah tidak bertentangan dengan pancasila. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah bernuansa syariah dianggap sama kedudukannya dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. *Kedua*, dilihat dari pandangan Siyasah Dusturiyah diberlakukan peraturan daerah bernuansa syariah berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana prinsip tersebut ialah perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah, sehingga dalam melaksanakan peraturan daerah bernuansa syariah ini umat Islam dapat melaksanakan perintah agama dan non Islam tidak ada paksaan untuk melaksanakannya.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHLIA

NPM : 1621020461

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ” adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 28 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,



**DAHLIA**  
**NPM. 1621020461**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

***Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260***

**PERSETUJUAN**

Kami tim pembimbing telah melakukan bimbingan dan koreksi  
sebagaimana mestinya, terhadap skripsi saudara :

Nama : DAHLIA  
NPM : 1621020461  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM  
SISTEM HUKUM DI INDONESIA

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H/Haryanto H., M.H.**  
**NIP. 195612051983031002**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP. 195812011987031003**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

***Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 703260***

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia"** disusun oleh **Dahlia, NPM 1621020461**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah di Ujikan dalam sidang munaqasyah di **Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Rabu, 23 September 2020**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua sidang : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H.**

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Drs. H. Haryanto H., M.H.**

Penguji III : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Dekan  
Fakultas Syariah**



**Hasanuddin, M.H.  
NPM.196210221993031002**



## MOTTO

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*“Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya.”*

(HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337).



## PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Tahir dan Ibunda tersayang Fatimah, yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah ridhonya Ayah dan bunda.
2. Ketiga Kakak tersayang Muhammad Nur, David Juanda dan Hendriansyah yang selalu mensupport dan memberi arahan serta penguatan mental dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat selama proses belajar ini.
3. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dahlia, merupakan anak bungsu dari pasangan bapak Tahir dan ibu Fatimah yang dilahirkan di Bungkok, 12 September 1997 Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Darul ‘Ulum Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bungkok, lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Marga Sekampung, lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Ma’arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2015.
4. Pada September 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Tata Negara Pada Tahun 2020 dengan gelar Dahlia, S.H.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2020

Penulis,

**Dahlia**  
**1621020461**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”.

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mon. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frengki, M.si. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.



4. Bapak Drs. H. Haryanto H, M.H dan Bapak Drs. Henry Iwansyah., M.A. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Kedua orang tua Ayahandaku (Tahir) dan Ibunda tercinta (Fatimah) dan ketiga kakak ku (M. Nur, David Juanda, Hendriansyah), yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Teman Seperjuangan HTN terkhusus angkatan 2016 kelas F, teman-teman yang sudah membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, Permata Sari, Ni'matuz Zuhroh, Siti Rofiah, Rini Ambar Sari, Mistati Intun Sari, Intan N.S, serta teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempat menimba ilmu.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebbaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

*Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh*





## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode penelitian .....	11
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
A. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	19
B. Pembagian Hukum Dalam Islam .....	32
C. Sistem Hukum Di Indonesia.....	44
D. Sumber Hukum dan Materi Muatan .....	50
E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	52
F. Pengertian Perda dan Perda Bernuansa Syariah .....	56
G. Tinjauan Pustaka.....	57
BAB III Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia .....	61
A. Latar Belakang dan Tujuan Terbitnya Peraturan Daerah Bernuansa Syariah .....	61
B. Sejarah perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah .....	62
C. Beberapa Contoh Perda Bernuansa Syariah .....	64
D. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Sanksi .....	76
BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....	82
A. Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia .....	82
B. Analisis Siyasah Dusturiyah.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi .....	88
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Analisis adalah Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>2</sup> Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Siyasah Dusturiyah* adalah penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan negara. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h.58.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2014), h.177.



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>3</sup>

Bernuansa merupakan kata dasar dari nuansa yang diberi imbuhan ber dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kepekaan terhadap, kewaspadaan atas, atau kemampuan menyatakan adanya pergeseran yang kecil sekali (tentang makna, perasaan, atau nilai.<sup>4</sup> Sedangkan Syariah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk.<sup>5</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bernuansa syariah adalah makna dari suatu kata yang memiliki pengaruh atau cerminan terhadap aturan yang Allah turunkan yang berkaitan dengan masalah aqidah ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak.

Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>6</sup> Sedangkan Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1

<sup>4</sup> Safuan Alfandi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Solo: Sendang Ilmu), h.369.

<sup>5</sup> Tarikh Tasyri' Al-Islam, Manna' Qathan, h.13.

<sup>6</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Media Presindo, 2018) , h.25.

kekuasaan hukum itu.<sup>7</sup> Dari pengertian keduanya dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu aturan atau norma yang bagian atau unsurnya berkaitan satu sama lain

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu penelaahan mengenai peraturan daerah bernuansa syariah dalam analisis siyasah dusturiyah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

- a. Penerapan Perda Syariah semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, Perda bernuansa syariah merupakan Perda biasa yang di dalamnya berisikan konsep atau norma-norma yang berlandaskan hukum Islam. Materi muatan Perda bernuansa syariah yang berisikan nilai-nilai keislaman menarik untuk dikaji, apakah Perda yang memuat nilai keislaman ini masuk dalam sistem hukum di Indonesia atau tidak. Oleh karena itu penulis ingin melihat apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum nasional, dan bagaimana Perda bernuansa syariah dilihat dari Pandangan Siyasah Dusturiyah.
- b. Untuk penulisan mengenai peraturan daerah memang sudah banyak dibahas namun pembahasan mengenai analisis siyasah dusturiyah

---

<sup>7</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2015), h. 49.



terhadap peraturan daerah bernuansa syariah belum pernah saya temui sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## 2. Secara Subyektif

- a. Tema tentang “Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” menurut saya pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah.
- b. Kajian terkait Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, di mana Perda tersebut merupakan bidang keilmuan penulis dalam jurusan siyasah yang notabenenya adalah membahas tentang peraturan hukum positif beserta aturannya.

## C. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum nasional sebagaimana yang dinyatakan Friedman, memiliki fungsi untuk menyebarkan dan memelihara pengalokasian nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai Negara merdeka, sistem hukum nasional merupakan kebutuhan pokok guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi pengadopsian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional terjadi problematika. Problematika ini muncul

---

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social, Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, h. 17.

dengan alasan bahwa dalam konteks internal hukum Islam banyak aliran-alirannya yang memiliki pemikiran berbeda dalam merespon kenyataan-kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

Lahirnya peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi yang merupakan konsekuensi logis dari demokratisasi. Demokratisasi merupakan proses perubahan dari struktur dan sistem pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>9</sup>

Peraturan daerah bernuansa syariah hadir di era reformasi membawa warna baru dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum positif di Indonesia di mana Islam sangat berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Hal tersebut dapat kita bandingkan melalui kesejahteraan pemerintahan kita di mana di saat orde lama dan orde baru Islam tidak memiliki pengaruh dan kontribusi dalam sistem hukum positif kita. Tetapi hal ini justru menjadi angin segar bagi ilmuwan Islam di Indonesia pada era reformasi hadirilah sebuah peraturan daerah bernuansa syariah sebagai aspirasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan setiap daerah dalam membentuk suatu peraturan daerahnya dibentuk berdasarkan kebutuhan sosial struktural lingkungan dan kemasyarakatan yang mendukung untuk perubahan dan tetap mumpuni terhadap kebutuhan.

---

<sup>9</sup> Rishwandha Imawan, *Desentralisasi Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris (Ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-2, LIPI Press, Jakarta, 2005, h. 39.

<sup>10</sup> Junaidi, *Relasi Agama & Negara* (Cianjur:IMR Press,2012), h.14

Berbagai macam polemik muncul atas pemberlakuan peraturan daerah bernuansa syariah diberbagai daerah karena dianggap melanggar amanat konstitusi, dan tidak mencerminkan toleransi. Selain itu, peraturan daerah bernuansa syariah juga berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai contoh penulis memilih Nangroe Aceh Darussalam untuk menganalogikan hadirnya sebuah produk hukum yang dipengaruhi oleh kultur di Aceh itu sendiri di mana Aceh yang mayoritasnya beragama Islam serta beberapa produk hukum lainnya di antaranya pembedaannya berdasarkan *Mahkamah Syar'iyah* dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait dengan prinsip kebebasan beragama karena memberlakukan hukum cambuk bagi kalangan non-muslim.

Namun di Kabupaten Mukomuko Peraturan daerah bernuansa syariah lebih ditujukan hanya kepada masyarakat yang beragama Islam saja, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa,<sup>11</sup> mewajibkan setiap siswa dan calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an, ketentuan ini juga berlaku bagi siswa yang beragama selain Islam dengan menggunakan tuntunan menurut kepercayaannya.

Peraturan daerah bernuansa syariah di Kota Mukomuko jika dilihat dari landasan sosiologis, hadirnya Perda ini berdasarkan kondisi sosial struktural di daerah Kabupaten Mukomuko yang menganut falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan membaca huruf Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar, siswa

---

<sup>11</sup> Lihat Perda Kota Mukomuko Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin



Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Mukomuko ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an.

Maka hadirnya Perda bernuansa syariah di Kabupaten Mukomuko tersebut sifatnya tidak mendiskriminasi pada suatu golongan. Kehadiran dan keberlangsungan Perda bernuansa syariah bisa tetap terus berjalan di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan serta struktur sosial pada wilayah tersebut dengan tidak menimbulkan dampak negatif bagi struktur sosial bagi wilayah tersebut.

Berdasarkan beberapa contoh Perda bernuansa syariah di wilayah di Indonesia maka penulis tertarik untuk melihat lebih terperinci bagaimana eksistensi peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah.

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya :

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya.” (HR. Bukhari).

Penjelasan hadits di atas, peran kemampuan seseorang dalam menjalankan syariat memiliki arti yang begitu penting, sehingga baiknya dalam menerapkan kebijakan Perda bernuansa syariah terlebih dahulu

melihat keadaan daerah secara mendalam, layak kah daerah tersebut diterapkan Perda bernuansa syariah, atau justru akan mengakibatkan kegaduhan dan memunculkan problematika lainnya.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyasah disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahaliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>12</sup>

Jadi kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) menjalankan tugas *siyasah syar'iyahnya* yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul: “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”.

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin.....*, h. 187-188.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 188

#### **D. Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan, yaitu mengenai "Analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia".

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia, dan melihat analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia secara lebih mendalam lagi.

#### **E. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah?



## **F. Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada terutama ilmu siyasah syar'iyah pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang hukum Islam.
  - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan siyasah syar'iah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Signifikasi Penelitian**

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui apa alasan peraturan daerah bernuansa syariah ini dibuat dan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap hal tersebut. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang di bidang hukum Islam . Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tatanegara khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode bisa diartikan sebagai tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

### a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia.

## 2. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 24

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 29.



bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>17</sup> Data dalam skripsi ini merupakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas :

- 1) Undang Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain :
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bahan Hukum Sekunder
- 4) Beberapa Peraturan Daerah Bernuansa Syariah
  - a) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dari Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

- b) Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat
- c) Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
- d) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila
- e) Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat
- f) Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila
- g) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
- h) Perda Kabupaten Maros nomor 16 tahun 2005 Tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
- i) Perda Kabupaten Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
- j) Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Berpakaian muslim dan muslimah
- k) Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa
- l) Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin

m) Perda Kabupaten Payakumbuh yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin

n) Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

o) Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa

p) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin

q) Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin

r) Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah

s) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat

t) Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

u) Perda Kabupaten Parigi Mautong Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu buku hukum positif, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum, buku hukum Islam, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan diperoleh dari ruang media cetak dan elektronik Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, dokumen bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.<sup>20</sup> Di antaranya berupa data pustaka, di mana referensi buku-buku terkait, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

<sup>18</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 50

<sup>19</sup> Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.68.

<sup>20</sup> Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012), h. 22.

dan beberapa Perda bernuansa syariah. Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca dan selanjutnya melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan untuk dimasukan ke dalam bagian skripsi penulis.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy John, Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kosda, 2001), h. 161.

d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam melakukan analisis penulis berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto yaitu : “Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya.”<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, h. 14.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>24</sup>

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>25</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah*

---

<sup>24</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

<sup>25</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27



adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>26</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>27</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>28</sup>

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat *Al-Qur'an* dan *Hadits*.<sup>29</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu :

#### a. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>29</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, h. 30.

perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

*b. Sunnah*

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.<sup>30</sup>

*c. Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari *'illat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *'illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>31</sup>

*d. Al-maslahah al-mursalah*

Pada umumnya *Al-Maslahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur

---

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

<sup>31</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

oleh *syariat* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-mashalahah al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashalahah al-murshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.<sup>32</sup>

e. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah* *Sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.<sup>33</sup>

f. *Al-'Adah*

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *Al-Adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-Adah as sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-,adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>34</sup>

g. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>33</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*,... h. 51.

<sup>34</sup> *Ibid*

kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.”<sup>35</sup>

#### *h. Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.<sup>36</sup>

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>37</sup>

Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi....*, h. 177.



memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 177-178.

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*..., h. 47.

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>40</sup>

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*..., h. 178.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 178.

<sup>42</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*..., h. 47.

h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>43</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu :<sup>44</sup>

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah

---

<sup>43</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, h. 47-48.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....*h. 157-158.

dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>45</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.<sup>46</sup>

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 158

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 159

memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>47</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

<sup>47</sup> Ibid., h.159



Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>48</sup>

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam

---

<sup>48</sup> Mutiara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*", h. 57

sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

dan Surat An-Nisa ayat 135 :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥١﴾

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* ditemukan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>ج</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

*Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.<sup>49</sup>

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih.

<sup>49</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam", h. 59

Atas dasar ayat ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

Sebegitu pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Hajj: 41 :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ

Artinya :(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

## B. Pembagian Hukum dalam Islam

Hukum Islam atau hukum *syara'* merupakan bahasa majemuk yang berasal dari bahasa Arab yaitu (*al-hukm asy-syar'i*) yang diartikan secara singkat sebagai hukum Islam. Sedangkan *al-hukm* secara etimologi berarti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan.

Pembagian hukum dalam Islam ada yang disebut dengan Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam, uraiannya sebagai berikut :

### 1. Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

#### a. Al-taklifi

Hukum *taklifi* ialah firman (titah) Allah yang berbentuk *thalab* (tuntutan) dan *takhyir* (pilihan) atas perbuatan. Pada umumnya *ushul fiqh* mendefinisikan hukum *taklifi* dengan sesuatu yang mengandung perintah untuk berbuat atau tidak berbuat ataupun untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat suatu perbuatan. Pelaksanaan hukum *taklifi* senantiasa dalam batas-batas kemampuan seorang mukallaf untuk melaksanakannya. Dengan kata lain tidak ada satu orang mukallaf pun yang tidak dapat melaksanakan hukum *taklifi* yang dibebankan kepadanya.<sup>50</sup>

Penjelasan yang agak terperinci berkaitan dengan hukum *taklifi* dapat diuraikan secara berurutan, mulai dari hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah sebagai berikut :

- 1) *Fardlu* atau *wajib* yaitu apabila terdapat nash syara berbentuk sighat amr atau yang semakna dengan itu berbentuk kata (*af'al*) atau yang semakna. Dari bentuk kata tersebut kita bisa memahami adanya tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Kemudian, kita mencari *qarinah* yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bersifat pasti. Berdasarkan *sighat thalab* (bentuk kata tuntutan) dan *qarinah* yang pasti inilah makna hukum perbuatan itu menjadi wajib.<sup>51</sup>

Contohnya firman Allah Swt pada surah At-Taubah:29 :

---

<sup>50</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 40

<sup>51</sup> 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih (kajian ushul fiqih mudah dan praktis)*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 13



فَتَبْلُؤُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya :Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2) *Mandub* yaitu terdapat nash syara yang memberikan arti adanya

tuntutan, kemudian terdapat *qarinah* yang memberikan arti *tarjih*

serta sifatnya yang tidak pasti, sehingga tuntutan tang sifatnya tidak

pasti itu memberikan arti mandub.<sup>52</sup>

3) *Haram* dan *mahzhur* yaitu apabila terdapat nash syara yang

menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu

perbuatan, baik berbentuk larangan (*sighat nahyi*) atau yang

semakna dengannya, kemudian terdapat *qarinah* yang

menunjukkan bahwa tuntutan (untuk meninggalkan) tersebut

bersifat pasti. Tuntutan yang bersifat pasti untuk meninggalkan

suatu perbuatan berarti (hukumnya) haram.<sup>53</sup>

4) *Makruh* yaitu suatu perbuatan yang *asy-Syar'i* menuntut mukallaf

untuk meninggalkan perbuatan tersebut secara tidak mesti

(menganjurkan untuk meninggalkannya), yang jika mukallaf

menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah, maka ia akan

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.15

diberi pahala, tetapi jika ia melanggar larangan itu, maka ia tidak dikenai dosa dan ancaman siksa.<sup>54</sup>

- 5) *Mubah* yaitu suatu perbuatan yang tidak diberi pujian atau celaan jika mukallaf mengerjakan atau meninggalkannya. Menurut sebagian ulama, hukum *mubah* itu sendiri identik dengan halal dan jaiz (boleh). Contoh perbuatan *mubah* ialah, perbuatan makan, minum, dan berpakaian yang halal.<sup>55</sup>

b. *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* yaitu firman (titah) Allah yang berbentuk ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai *sabab* (sebab) atau *syarth* (syarat) atau *mani'* (halangan) dari suatu ketetapan hukum. Ulama *ushul fiqh* mendefinisikan hukum *wadh'i* dengan aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang untuknya. Pembahasan mengenai hukum *wadh'i* berkaitan dengan tujuh hal utama yaitu sebagai berikut :

- 1) *Sabab* yaitu sifat yang dibatasi, yang ditunjukkan oleh dalil *sam'i* sebagai pemberitahu adanya (terwujudnya) hukum, bukan sebagai pemberitahu disyari'atkannya hukum. Adanya *sabab* membawa implikasi kepada adanya (terwujudnya) hukum, dan tidak adanya *sabab* membawa implikasi kepada tidak terwujudnya hukum.

---

<sup>54</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., h. 64

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 65

2) *Syarat* adalah sifat yang menyempurnakan perkara (yang disyaratkan), atas perkara yang dituntut oleh hukum, atau atas perkara yang dituntut oleh (perkara) yang disyaratkan itu. Syarat merupakan sifat yang menyempurnakan masyrut. Berwudhu misalnya, merupakan syarat bagi sahnya shalat, dan berwudhu bukan bagian dari shalat.<sup>56</sup>

3) *Mani'* (halangan) adalah sifat tertentu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i (wahyu) yang keberadaannya (*'illat*) mengharuskan eliminasi atas *'illat* sesuatu yang dilarangnya. Dengan kata lain, *mani'* adalah perkara yang mengharuskan adanya *'illat* yang bertentangan dengan *'illat* perkara yang dilarang. Dari definisi ini tampak jelas bahwa *mani'* merupakan lawan dari sebab, atau lawan dari suatu hukum. Contohnya, kekrabatan adalah menjadi sebab penerimaan harta warisan. Sedangkan membunuh dengan sengaja adalah *mani'* (halangan) untuk menerima waris. Jadi, *mani'* dalam contoh ini merupakan lawan dari hukum, sehingga dilarang menerima waris. Sementara kekerabatan tetap tidak dilarang.

4) *Shihah, buthlan dan fasad*

a) *Shihah* (sah) adalah kesesuaian dengan perintah Syari'.

Contohnya, dengan memenuhi rukun shalat dan syarat-syaratnya maka shalat disebut shalat yang shahihah (sah).

---

<sup>56</sup> Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*..., h.35-37

b) *Buthlan* (batal) adalah ketidaksesuaian dengan perintah Syari'.

Contohnya, apabila salah satu dari rukun shalat ditinggalkan, maka shalatnya batal.<sup>57</sup>

c) *Fasad* adalah asal perbuatannya sesuai dengan perintah syara, tetapi terdapat sifat perbuatan yang tidak merusak pokok suatu perbuatan, hanya bertentangan dengan perintah syara. Maka fasad bisa dihilangkan dengan dihilangkan sebabnya. Contohnya, jika seseorang membeli sapi, dan disyaratkan sapi itu bisa diperas susunya sekian liter. Jual beli seperti ini adalah jual beli fasad, karena samar pada sifat-sifat dan ukurannya. bukan pada asal *ma'qud alaih*.<sup>58</sup>

#### 5) *Azimah dan rukhshah*

*Azimah* adalah hukum yang disyariatkan secara umum dan mengikat hamba (manusia) untuk melaksanakannya. *Rukshah* adalah hukum yang disyariatkan sebagai keringanan dari 'azimah karena adanya alasan tertentu, tetapi hukum 'azimah tetap ada (berlaku). *Rukhshah* tidak bersifat memaksa/mengikat hamba untuk melaksanakannya.<sup>59</sup>

## 2. Konsep Takzir dalam Hukum Islam

Sebelum memahami apa itu *takzir* terlebih dahulu perlumengetahui apa itu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* secara bahasa merupakan bentuk verbal atau *masdar* dari kata *janayang* berarti berbuat dosa atau

---

<sup>57</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., h.43

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 44

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 45

salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau salah. Sedangkan *jarimah* adalah perbuatan pidananya.

Secara terminologi, pengertian *jinayah* sebagaimana menurut Imam al Mawardi ialah “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *takzir*”. Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.

Dalam sistem pidana Islam, *jarimah* dibagi kepada tiga macam yaitu: *jarimah*, *hudud*, *jarimah qishah* dan *diyat* serta *jarimah takzir*, penjelasannya sebagai berikut :

*a. Hudud*

Kata *hudud* secara etimologis berarti larangan. Sedangkan secara terminologis, *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an atau hadis. Hukuman *hudud* ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukuman *hudud* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun

*b. Qishah dan Diyat*

Menurut *Kamus Munawwir*, secara literal *qishah* adalah turunan dari kata *qashsha* yang berarti mendekati, menggunting, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas, sedangkan secara

istilah menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud *qishah* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Secara etimologi kata *diyat* berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, apabila yang digunakan adalah kata *mashdar (diyat)* maka berarti membayar harta tebusan atau denda yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.

### c. *Takzir*

#### 1) Pengertian *Takzir*

*Takzir* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu hukuman yang diberikan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>60</sup> Sedangkan secara istilah, *takzir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam *hudud*. *Takzir* diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun bentuk hukumannya tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an dan hadis,<sup>61</sup> sehingga bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa yang

---

<sup>60</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Arti kata takzir pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan*

<sup>61</sup> Zulkarnain Lubis; Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: prenadamedia group, 2016), h. 4



berwenang untuk memberikan hukuman. Dengan kata lain, negara atau hakim di sini diberi kebebasan untuk menjatuhkan sanksi kepada si pelaku.

## 2) Dasar Hukum *Takzir*

Dasar Hukum takzir Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.<sup>62</sup>

Menurut Al-Kahlani ulama sepakat bahwa perbuatan zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qodzaf, murtad, dan pembunuhan merupakan jarimah hudud selain yang disebutkan di atas merupakan jarimah takzir.

## 3) Macam-Macam Hukuman *Takzir*

Kendatipun masuk dalam lingkup pidana Islam, *takzir* pada hakikatnya merupakan sebuah proses pendidikan atau *ta'dib* dan

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 255

bukan merupakan suatu proses pembalasan apalagi penyiksaan.

Lebih tepatnya *takzir* dipahami sebagai proses penyadaran.<sup>63</sup>

Ada 11 macam hukuman takzir antara lain:<sup>64</sup>

a) Hukuman Mati

Diketahui bahwa *takzir* merupakan suatu pendidikan yang tujuannya untuk mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan lagi. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan dan pelaku terus berungkal melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Maka dalam hal ini cara satu-satunya untuk mencegah kejahatan tersebut adalah menyingkirkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid pada *takzir*, si terhukum akan kembali kedalam keseharian bersama keluarga setelah hukuman selesai.

c) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid

d) Hukuman pengasingan

Membuang si terhukum ke suatu tempat yang masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab

---

<sup>63</sup> Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2003), h. 118-119

<sup>64</sup> Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 155-172

kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

e) Hukuman Penyaliban

Hukuman penyaliban pada *takzir* ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum serta melakukan kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Hukumannya tidak lebih dari tiga hari.

f) Hukuman Pengucilan

Hukuman ini diperuntukkan kepada wanita yang *nusyuz*, membangkang pada suaminya. Sanksi ini merupakan sanksi bagi kejahatan ringan.

g) Hukuman Peringatan atau Ancaman

Sanksi peringatan merupakan sanksi ancaman-ancang bahwa si pelaku akan menerima hukuman jika melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu suatu hari.

h) Hukum Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan atau keburukan seseorang yang melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain.

i) Hukuman terhadap harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda ataupun penyitaan terhadap harta si pelaku.

j) Sanksi-Sanksi lain

Dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

k) Kaffarat

Suatu hukuman yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya.

4) Contoh-contoh Takzir

*Takzir* merupakan aturan yang mengatur pelanggaran yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, salah satu contohnya pada kasus koruptor, maka untuk sanksi yang dijatuhkan menyesuaikan dengan kehendak penguasa. Hukuman pencurian tidak dapat dijadikan rujukan untuk menghukum koruptor.<sup>65</sup> Demikian pula kejahatan-kejahatan lain sehingga penguasa dituntut untuk objektif tanpa membandingkan dengan kejahatan lain sebagai rujukan penjatuhan hukuman.

5) Kedudukan Takzir dalam sistem hukum Islam

Sudah dijelaskan bahwa *takzir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *syar'i*. Dalam perkara ini, *syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu hukum yang

---

<sup>65</sup> 'Ashmawi, Muhammad Sa'id, *Nalar Kritis syariah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), h. 50

dibuat penguasa diakui oleh Islam selagi tidak bertentangan dengan ketentuan Allah walaupun hukum yang dibuat tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadits maka sanksi itu termasuk dalam sistem hukum Islam.

### C. Sistem Hukum Di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum *Eropa kontinental*. Sistem hukum *Eropa kontinental* adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Selain sistem hukum *Eropa kontinental*, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam.<sup>66</sup>

Meskipun Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, lantas tidak membuat Indonesia menjadi Negara Islam. Dalam sejarah tercatat Indonesia pernah dijajah Belanda selama sekitar 350 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tidak hanya Belanda, Inggris dan Jepang juga turut pernah menjajah Indonesia walaupun dalam waktu tidak terlalu lama dibandingkan masa penjajahan Belanda. Dari gambaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia mengandung pluralitas baik dari segi waktu maupun jenis.

---

<sup>66</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Indhillco,1997), h. 73

Pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga macam sistem hukum yang merupakan konsekuensi yang dianut oleh penduduk Indonesia, yaitu:<sup>67</sup>

1. Dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat istiadat disebut dengan “hukum adat”. Dalam pengertian yang dinamis, jenis hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).
2. Dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. Oleh karena itu, sebagai mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga harus dicatat bahwa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial, sehingga tidak harus selalu mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik.

---

<sup>67</sup> A. Qodri Azizy, Hukum Nasional : *Elektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Cetakan ke-1, (Jakarta Selatan:Teraju, 2004), , h. 137-138



3. Sebagai negara yang pernah dijajah selama 350 tahun, jelaslah negara penjajah tidak mungkin untuk tidak membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justru sangat mungkin para penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia yang mereka jajah. Ini yang kemudian disebut dengan sistem hukum belanda atau sistem hukum barat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.

Lebih kongkretnya lagi, ketika Indonesia merdeka, hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dikutip dari Kansil adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

”Dalam bidang kedinasan ada satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *Wetboek van Strafrecht* dari tahun 1918, yang sudah berlaku untuk semua penduduk Indonesia”.

Namun, oleh karena beberapa daerah di luar Jawa masih saja mempunyai peradilan asli, *Wetboek van Strafrecht* tadi tidak berlaku di daerah tersebut, selainnya hanya suatu rangkaian pasal-pasal yang oleh Undang-Undang Tahun 1932 No. 80 dinyatakan berlaku.

Bidang keperdataan keadaannya masih saja demikian bahwa resminya berlaku beraneka warna kelompok hukum, sebagai peninggalan politik hukum pemerintah kolonial Belanda. Berbagai kelompok tersebut sebagai berikut :

- a. Hukum yang berlaku untuk semua penduduk, misalnya Undang-

---

<sup>68</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 200

Undang Hak Pengarang, Undang-Undang Milik Perindustrian, dan lain sebagainya;

- b. Hukum adat yang berlaku untuk semua orang Indonesia asli;
- c. Hukum Islam untuk semua orang Indonesia asli yang beragama Islam, mengenai beberapa bidang kehidupan mereka, meskipun resmi (menurut pasal 131 I.S.) berlakunya hukum ini adalah sebagai hukum adat yang untuk bidang-bidang tersebut “menganut” hukum Islam;
- d. Hukum yang khusus diciptakan untuk orang Indonesia asli, yang berupa undang-undang, seperti Undang-Undang (ordonansi) tentang Maskapai Andil Indonesia, Undang-Undang (ordonansi) Perkawinan orang Indonesia Kristen, dan lain sebagainya.
- e. *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*, yang diperuntukkan mula-mula bagi orang Eropa, kemudian dinyatakan berlaku untuk orang Tionghoa, sedangkan beberapa bagian (terutama dari W.v.K.) juga telah dinyatakan berlaku untuk orang Indonesia asli, misalnya hukum perkapalan (hukum laut).

Hukum Islam sebagai salah satu dari tiga bahan baku hukum nasional semakin jelas dan konstitusional dengan lahirnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, yang merupakan produk konstitusional dalam era reformasi juga menegaskan arah kebijakan hukum nasional ini, yaitu :

“Menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif,

termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum Nasional secara garis besar bersumber pada hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Secara teoritis sumber-sumber hukum Islam, hukum adat dan hukum barat mempunyai nilai dan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sumber hukum nasional.<sup>69</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Perlu diketahui juga dalam pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan mengenai urusan pemerintahan yang membagi urusan pemerintahan tersebut atas :<sup>70</sup>

- 1) Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat;
- 2) Urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan

---

<sup>69</sup> Faisal, *Menimbang Wacana Formulasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal al-Muqarin Vol.XII, No.1, Januari 2012.

<sup>70</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3) Urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustitisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama

Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa urusan agama yang merupakan urusan pemerintahan absolut, nyatanya dimungkinkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada instansi yang ada di daerah. Dengan kata lain bahwa peraturan daerah syariah merupakan peraturan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan, yaitu dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang muatannya mengatur tentang urusan agama.

Penulis ingin memberikan gambaran bahwa dengan adanya fakta bahwa sistem hukum di Indonesia yang sangat plural, maka eksistensi dari seluruh peraturan perundang-undangan tidak dapat dijauhkan dari keberadaan sistem hukum tersebut, termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah yang memiliki substansi atau bermuatan nilai-nilai ajaran agama Islam (peraturan daerah bernuansa syariah. Namun, tetap saja harus diperhatikan bahwa sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntut yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.

#### **D. Sumber Hukum dan Materi Muatan**

Hukum di Indonesia harus berdasarkan penuntun yang disepakati atau ideologi, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Pancasila memiliki empat penuntun hukum yang salah satunya adalah tidak memperbolehkan penerapan hukum berdasar agama tertentu walaupun atas nama demokrasi. Sebagai catatan penting bahwa apabila peraturan perda tersebut memiliki substansi yang baik itu sangat dianjurkan namun konsiderannya tidak didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits.

Walaupun mayoritas warga Indonesia beragama Islam namun perundangan dan peraturan harus menghormati hak-hak umat lain, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Hukum agama manapun pasti benar namun hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum negara. Segala bentuk

peraturan, hukum, norma dan etika harus berdasarkan peraturan yang universal dan diterima oleh semua golongan, terutama bangsa Indonesia berdasarkan atas Pancasila yang menjamin seluruh hak warga negara dan tidak membedakan agama apapun. Sehingga dalam pembuatan suatu perda itu harus memperhatikan asas kepatuhan pada hierarki (*lex superior derogat lex inferior*); peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan. Secara substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender yang sudah tercantum di dalam konstitusi; jaminan integritas hukum nasional; dan peran negara versus masyarakat dalam negara demokrasi.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>71</sup>

Kedudukan peraturan daerah bernuansa syariah dalam hierarki secara eksplisit tidak tercantum. Istilah peraturan daerah pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menegaskan adanya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian kedudukan

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

peraturan daerah bernuansa syariah dianggap sama dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Karena pada hakikatnya peraturan daerah bernuansa syariah merupakan peraturan daerah biasa yang materi muatannya berisi nilai-nilai keislaman.

Jika dilihat dari tertib hukum formil maka peraturan daerah bernuansa syariah tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, meskipun masalah agama merupakan domain pemerintah pusat. Masalah agama yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf F adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Sehingga jika peraturan daerah bernuansa syari'ah mengatur menyangkut hal-hal di atas, meskipun skopnya lokal, maka secara tertib hukum nasional ia dianggap bertentangan dan wajib dinyatakan tidak berlaku.

#### **E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan peraturan perundang-undangan yang disebut hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :<sup>72</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengertian Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>73</sup>

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

TAP MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

---

<sup>72</sup> Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia*, (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah, 2010), h.42

<sup>73</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

Undang-Undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR. Dalam pembentukannya, Undang-Undang ini bisa saja presiden yang mengajukan Rancangan Undang-Undang yang akan sah menjadi Undang-Undang jika DPR menyetujuinya, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan pengertian Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa :

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.<sup>74</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat) dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Perppu dibuat oleh Presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR. (2) Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (3) DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan. (4) Jika ditolak DPR, Perppu tersebut harus dicabut.

#### 4. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Peraturan Pemerintah diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa :

“Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai fungsi organik dari Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

#### 5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

#### 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

#### 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

Bupati/Walikota.

Dari susunan hierarki di atas dapat diketahui bahwa peraturan daerah masuk pada urutan hierarki ke 7 dalam susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **F. Pengertian Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah**

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan peraturan daerah bernuansa syariah perlu dipahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan peraturan daerah. Pengertian Peraturan Daerah secara yuridis yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>75</sup>

Dari pengertian peraturan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah bernuansa syariah menurut A.M. Fatwa, istilah Perda Syariah sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1

Undangan, tidak mengenal adanya istilah perda syariah, melainkan hanya Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Jadi, perda syariah yang dimaksud adalah Perda biasa yang materi muatannya mengandung unsur-unsur maupun nilai-nilai agama tertentu. Hal ini harus dibedakan, karena dapat menyesatkan hingga muncul pemahaman seolah-olah perda tersebut adalah syariat Islam.<sup>76</sup>

Dengan demikian istilah perda syariah tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terkait istilah tersebut, maka penulis menyebutnya dengan istilah perda bernuansa syariah.

#### G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Supardi Usman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Eksistensi Perda-Perda Syariat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan dari segi *legal substance* atau substansi hukum merupakan bentuk positifisasi norma yang bersumber dari hukum Islam menjadi kaidah hukum positif. Ditinjau dari segi *legal structure* atau struktur hukum, perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar secara legal ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Kepolisian.

---

<sup>76</sup> A.M. Fatwa, “Perda Syari’ah Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia,” dimuat di [http://www.kompasiana.com/amfatwa/perda-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia\\_551235428133114b54bc6221](http://www.kompasiana.com/amfatwa/perda-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia_551235428133114b54bc6221), di akses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 14.00.

Ditinjau dari segi *legal culture* atau kultur hukum, eksistensi perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar didukung oleh kultur dan budaya masyarakat Takalar yang cenderung religius oleh karena hasil akulturasi peradaban Makassar dan Islam. Berdasarkan elaborasi penulis, tidak ditemui pelanggaran konstitusional atas eksistensi perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar. Landasan politis atas lahirnya perda-perda bernuansa syariat di Kabupaten Takalar didasari inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk mengakomodir aspirasi bersyariat masyarakat Takalar yang mayoritas beragama Islam.<sup>77</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Supardi Usman dengan penelitian ini perbedaannya adalah penelitian Abdurrahman Supardi Usman membahas tentang eksistensi Perda syariat di Kabupaten Takalar sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan Perda bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Esa Mariyani (2011), Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok-Sumatera Barat. Penelitian ini membahas tentang adanya keinginan dari banyaknya daerah untuk membuat dan menerapkan Perda syariat mencerminkan bahwa otonomi daerah lebih ditafsirkan secara bebas oleh berbagai kepala daerah sebagai kemerdekaan bertindak dan memberlakukan kebijakan yang mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kepala daerah

---

<sup>77</sup> Abdurrahman Supardi Usman, "*Eksistensi Perda-perda Syariat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*", (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 67

tidak keliru dalam menafsirkan sebagian kewenangannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak keluar dari semangat awal diberlakukan otonomi daerah.<sup>78</sup> Berbeda dengan penelitian Esa Maryani yang membahas tentang Perda keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sedangkan penelitian ini membahas apakah Perda bernuansa syariah masuk dalam sistem hukum di Indonesia.

3. Eka Riowati (2017), Fakultas Syariah IAIN Surakarta, yang berjudul Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Kebinekaan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Keberadaan Peraturan Daerah Agam Nomor 6 Tahun 2005 tidak relevan terhadap konsep pokok dalam Fiqh Kebinekaan. Pertama dalam Konsep *ummah*, perda tersebut mencerminkan konsep *ummah* dalam sifat eksklusif bukan inklusif dan egaliter. Kedua, dalam konsep hubungan mayoritas dan minoritas, perda tersebut cenderung mendiskriminasi hak-hak masyarakat minoritas dalam hal agama khususnya mengenai cara berpakaian. Ketiga, dalam konsep kepemimpinan dalam masyarakat majemuk, Perda tersebut menepiskan kemajemukan budaya dalam masyarakat dengan menggantikan budaya Minangkabau dengan budaya Islam.<sup>79</sup> Dalam penelitian Esa Riowati membahas tentang keberadaan

---

<sup>78</sup>Esa Maryani, “Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok-Sumatera Barat”, (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 85

<sup>79</sup>Eka Riowati, “Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Kebinekaan”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Surakarta, 2017), h. 98



Perda bernuansa syariah dalam perspektif kebinekaan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan Perda bernuansa syariah dalam pandangan siyasah dusturiyah.

Dari tiga sumber di atas dapat dikemukakan di sini bahwa meskipun pada sisi topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan yang tegas terutama dalam hal sudut tinjauan dan lokasi penelitian serta penelitian ini memfokuskan pada analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. TAFSIR

QS An-Nisa 59 Tafsir at-Thabari, juz 5, h. 147-149

Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nisa ayat 58

Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nisa ayat 135

Tafsir Ibnu Katsir Surah Ali-Imran ayat 159

Tafsir Ibnu Katsir Surah Ali Imran: 104

Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hajj ayat 41

Tafsir Ibnu Katsir Surah At-Taubah ayat 29

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Maidah ayat 33

### B. HADITS

Kitab Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337

### C. BUKU-BUKU

Alfandi, Safuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Solo: Sendang Ilmu.

Ashmawi, Sa'id, Muhammad, *Nalar Kritis syariah*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2004.

Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional : Elektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Cetakan ke-1, Jakarta Selatan:Teraju, 2004.

Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi keempat Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

- Fauzi, Ihsan Ali, Mujani, Saeful, *Gerakan Kebebasan Sipil Studi Dan Advokasi Kritis Atas Perda Syari'ah*, Jakarta, Nalar, 2009.
- Friedmen M, Lawrence, *The Legal System, A Social, Science Perspektive*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Imawan, Rishwandha, *Desentralisasi Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris (Ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-2, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenada Media, 2014.
- Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Junaidi, *Relasi Agama & Negara Cianjur*:IMR Press,2012.
- Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Khalil, 'Atha bin, *Ushul Fiqih (kajian ushul fiqih mudah dan praktis)*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003Raharjo,Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Media Presindo, 2018.
- Lubis, Zulkarnain; Ritonga,Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta:prenadamedia group, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy John, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosda, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*, Raja Jawa Barat:Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- Sadi, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009

Soekanto, Soerjono, dari Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Tarikh Tasyri' Al-Islam, Manna' Qathan.

Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012.

Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Arti kata takzir pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan.

Zuhraini, *Tata Negara Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah, 2010.

#### **D. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf "f" UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat Dalam Wilayah Lampung Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros.

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa.

Peraturan Daerah di Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Membaca Al-Quran Bagi Siswa.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila Dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Berpakaian muslim dan muslimah di Kota Solok.

Peraturan Daerah Kota Solok Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Zakat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

#### **E. INTERNET**

A.M. Fatwa, “Perda Syari’ah Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia,” dimuat di [http://www.kompasiana.com/amfatwa/perda-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia\\_551235428133114b54bc6221](http://www.kompasiana.com/amfatwa/perda-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia_551235428133114b54bc6221), di akses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 14.00.

#### **F. JURNAL**

Denny Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Yustisia Edisi 81 September-Desember 2010.

Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syariah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, Jurnal volume 1, Nomor 1, 2018.

Faisal, *Menimbang Wacana Formlisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal al-Muqarin Vol.XII, No.1, Januari 2012.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Vol 2 No. 1 (2017).

#### **G. SKRIPSI**

Abdurrahman Supardi Usman, “Eksistensi Perda-perda Syariat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”, (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).

Eka Riowati, “Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam Perspektif Kebinekaan”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Surakarta, 2017).

Esa Mariyani, “Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok-Sumatera Barat”,(Skripsi Program Sarjana Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).